

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1Latar Belakang

Kolaborasi merupakan proses dimana orang dengan tujuan yang berbeda bekerja bersama untuk mencapai manfaat yang tidak dapat mereka capai secara individual (Pfeffer, 1994). Kolaborasi adalah sebuah proses dimana komunitas lokal dan berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengatur dan mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan (Ostrom, 1990). Kolaborasi antar kelompok memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kepentingan dan perspektif masing-masing pihak serta komitmen untuk bekerja sama dalam mencapai solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Manfaat bagi masyarakat lokal secara keseluruhan dapat dilihat dari sejauh mana dampak tersebut memberikan nilai keberlanjutan bagi masyarakat lokal. Menurut Dwyer dan Kim (2015), manfaat kolaborasi bagi industri pariwisata dapat secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri, dapat menjalankan industri dengan aman, membantu menciptakan lapangan pekerjaan serta mempermudah mendatangkan investor dalam pengembangan industri pariwisata.

Proses terjadinya kolaborasi dapat digambarkan dengan sebuah diagram/flow chart yang meliputi beberapa tahapan dalam proses tersebut. Ada beberapa tahap yang terjadi dalam proses kolaborasi seperti yang dikemukakan oleh Carlson (2007), bahwa uraian tugas dari pemimpin di dalam *collaborative governance* didasarkan pada apa yang mereka lakukan yakni sebelum, selama, dan sesudah terjadi. Lebih jelas dari apa yang telah dikemukakan oleh Carlson (2007) adalah apa yang dikemukakan oleh Chrislip (2002) bahwa kolaborasi meliputi bagaimana memulai, menyiapkan keberhasilan, bekerja bersama, dan mulai melakukan aksi (Stephens, 2012).

Kolaborasi antara pemangku kepentingan industri pariwisata dan masyarakat lokal sangat penting untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan (Bhatta 2023). Kolaborasi yang sukses mengarah pada peningkatan manfaat bagi masyarakat lokal di mana kegiatan kolaboratif secara signifikan meningkatkan pendapatan lokal dari pariwisata (Morsch, 2022).

Sosial Exchange Theory atau teori pertukaran sosial telah memberikan kontribusi teoritis yang paling penting dalam bidang persepsi penduduk terhadap pariwisata (Fredline dan Faulkner, 2000). Menurut Ap (1992) SET sebagai teori sosiologi umum yang berkaitan dengan pemahaman pertukaran sumber daya antara individu dan kelompok dalam situasi interaksi. Pertukaran sosial sebagai pertukaran aktivitas, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang kurang ataupun lebih, bermanfaat ataupun tidak, yang disepakati antara setidaknya dua orang maupun dua kelompok organisasi (Homans, 1964).

Menurut SET, pertukaran sosial melibatkan hasil ekonomi dan/atau sosial (Cropanzano dan Mitchell, 2005). Bagaimana masyarakat lokal memandang elemen ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan dalam pertukaran mempengaruhi cara mereka bereaksi terhadap pariwisata (Andriotis dan Vaughan, 2003, hlm. 173). Pertukaran sosial melibatkan prinsip bahwa satu orang membantu orang lain, dan meskipun ada harapan umum mendapatkan imbalan di masa depan (Blau, 1986). Mereka dapat menjadi marah ketika mereka tidak menerima tingkat pengembalian yang adil (Homans, 1974).

Ketidaksetaraan dapat muncul dari pertukaran karena beberapa aktor menguasai sumber daya yang lebih bernilai tinggi dibandingkan aktor lainnya (Blau, 1964). Dampak sosial pariwisata sering dikaitkan dengan perubahan dalam kehidupan sosial sehari-hari penduduk akibat pengembangan pariwisata dan kegiatan pariwisata yang dapat mengubah rutinitas, kebiasaan, dan perilaku penduduk (Fredline, 2003). Pariwisata merupakan pedang bermata dua yang dapat memecah belah masyarakat, dapat meningkatkan kepadatan penduduk, kebisingan, sampah, dan kejahatan. Pariwisata dapat memodifikasi budaya suatu destinasi dan berdampak negatif pada penduduk, yang mengarah pada intoleransi dan kejahatan. Namun, pariwisata juga mengembangkan rasa memiliki, kebanggaan masyarakat, dan kualitas hidup, yang sangat penting untuk menjaga masyarakat sipil yang sehat (Kunwar, 2021).

Pertukaran sosial yang berlangsung dalam hubungan kolaborasi memungkinkan individu atau kelompok untuk saling memberikan kontribusi, memperluas jaringan, serta mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Kolaborasi ini menekankan pada nilai solidaritas dan kerjasama yang mendalam, yang pada gilirannya memperkuat

hubungan sosial dan meningkatkan hasil yang dicapai (Putnam, 2000). Kolaborasi yang optimal dapat tercapai melalui pertukaran sosial yang efektif, dimana individu atau kelompok saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Pertukaran sosial ini memperkuat kepercayaan, meningkatkan komunikasi, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja kolaboratif (Tschannen-Moran & Hoy, 2000).

Pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dalam berbagai proses kolaborasi harus aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ini tentunya harus menciptakan konsep yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Para pemangku kepentingan pariwisata dapat mendukung pengembangan masyarakat lokal melalui solidaritas emosional, sikap positif, komitmen, dan manfaat ekonomi yang dirasakan, yang pada gilirannya membantu pembangunan pariwisata berkelanjutan (Wu, 2023).

Secara empirik sering disaksikan bahwa beberapa pemangku kepentingan hanya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki tujuan dan sumber daya yang sama, sementara pemangku kepentingan lainnya diabaikan atau dipinggirkan (Stoker, 1995). Sejauh mana pemangku kepentingan melihat adanya manfaat positif untuk menarik partisipasi masyarakat. Misalnya, para pengelola usaha pariwisata dapat didorong untuk berkolaborasi jika hal tersebut menawarkan prospek pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, sumber daya tambahan untuk mencapai tujuan mereka, atau perbaikan dalam pengelolaan destinasi (Jamal & Getz, 1995).

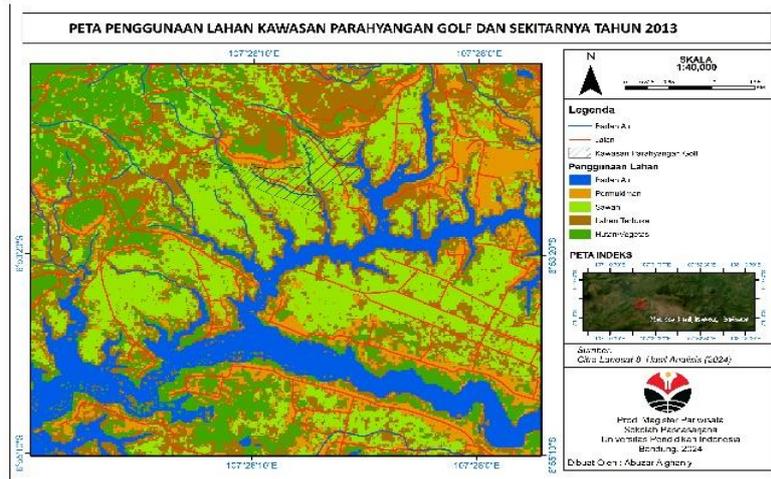
Bahkan Sebaliknya, pemangku kepentingan mungkin tetap berada di pihak luar karena mereka khawatir melakukan kolaborasi tersebut akan menimbulkan dan merugikan destinasi pariwisata itu sendiri (Stoker 1995). Sulit untuk melihat keseimbangan dan keadilan yang representatif di antara kelompok pemangku kepentingan. Misalnya, keadilan apa yang harus ada antara pemangku kepentingan yang mempunyai kekuasaan terhadap mereka yang mempunyai kekuasaan kecil. Lalu antara masyarakat yang tinggal di destinasi yang terkena dampak langsung oleh kebijakan dan pembangunan industri pariwisata.

Dalam pengelolaan usaha golf, inklusif berarti manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok

rentan. Penerapannya mencakup perekrutan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM setempat, program pelatihan, dan pembagian keuntungan yang adil. Sebaliknya, eksklusif berarti akses dan manfaat hanya dinikmati kelompok tertentu, misalnya melalui biaya keanggotaan tinggi dan pembatasan fasilitas, sehingga meminimalkan interaksi dengan masyarakat lokal. Di Indonesia, lapangan golf cenderung bersifat eksklusif karena model bisnis berbasis keanggotaan dan standar layanan premium, yang berisiko memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, perubahan menuju model inklusif penting untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat serta memastikan keberlanjutan usaha, meskipun kualitas layanan tetap harus dijaga.

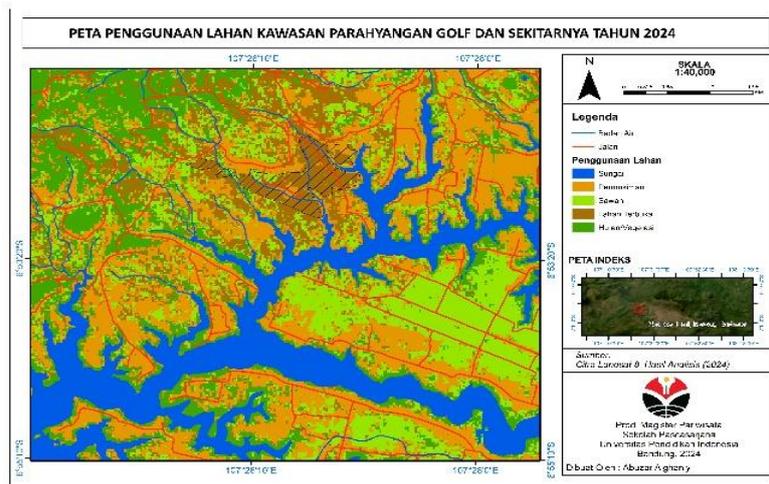
Selain itu, pembangunan industri pariwisata, khususnya kawasan rekreasi eksklusif, kerap kali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam perkembangannya. Hal ini terutama terjadi apabila pembangunan dikembangkan di kawasan pedesaan. Salah satu masalah utamanya adalah kolaborasi yang terhambat akibat ketidakseimbangan dalam pertukaran sosial antara kawasan industri pariwisata dan masyarakat pedesaan, seperti yang terjadi di Kota Baru Parahyangan. Namun demikian, pembangunan kawasan industri di Kota Baru Parahyangan dalam beberapa dekade terakhir telah memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, pertumbuhan ekonomi daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur penunjang industri pariwisata itu sendiri.

Salah satu desa yang merasakan dampak pembangunan kawasan rekreasi eksklusif dari industri pariwisata yaitu Desa Cikande Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung barat. Pembangunan rekreasi eksklusif dalam kawasan Kota Baru Parahyangan khususnya PT Parahyangan Golf mulai beroperasi pada tahun 2018 setidaknya sudah mempengaruhi sebagian besar kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari perubahan lahan sebagai mata pencaharian masyarakat yang dahulunya didominasi oleh perkebunan, sawah, hutan belukar yang secara signifikan berubah menjadi kawasan rekreasi eksklusif yang dipagari oleh beton – beton tinggi kawasan pariwisata. Berikut merupakan peta penggunaan lahan kawasan sekitar golf 10 tahun terakhir :



Gambar 1. 1 Peta penggunaan lahan kawasan golf tahun 2013
Sumber : Hasil analisis 2024

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 kawasan *golf course* didominasi oleh jenis penggunaan lahan sawah, perkebunan, pemukiman dan lahan terbuka. Lalu pada fakta lapangan sekarang jenis penggunaan lahanya mulai terdegradasi menjadi kawasan rekreasi eksklusif industri pariwisata. Sawah dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar, mulai berubah menjadi bangunan dan industri pariwisata. Berikut peta penggunaan lahan aktual pada tahun 2024 :



Gambar 1. 2 Peta penggunaan lahan kawasan golf tahun 2024
Sumber : Hasil analisis 2024

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwasanya peralihan jenis penggunaan lahan dalam 10 tahun terakhir sangat signifikan. Kawasan rekreasi eksklusif industri pariwisata *golf course* (yang diarsir) yang dahulunya merupakan lahan perkebunan dan sawah warga

Abuzar Al-ghaniy, 2025

ANALISIS PERTUKARAN SOSIAL DALAM OPTIMALISASI PROSES KOLABORASI INDUSTRI DENGAN MASYARAKAT LOKAL UNTUK Mendukung PENERAPAN EKONOMI INKLUSIF DI KAWASAN REKREASI EKSKLUSIF

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

secara perlahan mempengaruhi perubahan kawasan sekitarnya, sehingga masyarakat yang dahulunya bermata pencaharian sebagai petani mulai terkena dampak akibat hilangnya lahan mereka.

Hal ini dilatarbelakangi oleh pembelian lahan masyarakat dengan harga yang rendah sekitar Rp.150.000-350.000/tumbak pada tahun 2000. Sehingga pada saat ini kawasan yang terbangun oleh industri pariwisata tersebut mulai menimbulkan beberapa permasalahan yang sampai sekarang terus terjadi. Pembangunan industri menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat hal tersebut dikarenakan terjadinya peralihan lahan serta kehilangan mata pencaharian penduduk yang awalnya sebagai lahan perkebunan beralih menjadi kawasan industri. Faktor kurang siapnya kemampuan pengetahuan dan pendidikan masyarakat menjadikan masyarakat sekitar tidak dapat bersaing untuk menjadi bagian dari industri tersebut.

Fakta empirik yang terjadi menunjukkan bahwa kondisi masyarakat akan pembangunan industri pariwisata *golf course* ini masih belum diterima secara menyeluruh oleh masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan masih maraknya terjadi pertentangan dan perusakan terhadap kawasan rekreasi eksklusif ini oleh oknum masyarakat lokal. Misalnya saja peristiwa yang terjadi sebulan yang lalu tepatnya pada tanggal 04 Oktober 2024 telah terjadi perusakan *green* (area rumput paling halus tempat lubang bola golf) dengan cara dicangkul terhadap oleh sekelompok oknum masyarakat. Sumber dari Iwan (*security leader* Parahyangan Golf). “Biaya yang harus dikeluarkan apabila *green* lapangan mengalami kerusakan hampir ±Rp.50-100 juta mulai dari biaya perbaikan tanah, pembibitan rumput, biaya operasional, dll.” Sumber dari Sofyan (*manager golf course maintenance*).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak keamanan Parahyangan Golf bahwa pada bulan – bulan sebelumnya juga masih banyak permasalahan serupa yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap lapangan Parahyangan Golf, baik daerah *fairway*, *green*, maupun sekitar *shelter*. “ditambah lagi banyak pemain (*Golfer*) yang sering kehilangan bola saat bermain” tutur Iwan. Pada saat ini disekitar kawasan golf dijaga ketat oleh security, masing – masing satu orang security disetiap hole (lubang golf) yang berjumlah 18 hole, ditambah masing – masing security pula disetiap shelter (tempat istirahat pemain). Biasanya oknum masyarakat yang melakukan kerusakan itu

pada malam hari dikarenakan yang menjaga kawasan golf pada malam hari hanya empat orang security.

Pada saat observasi ke lapangan tepatnya pada pagi menjelang siang hari peneliti seringkali menemukan masyarakat lokal yang diam – diam bersembunyi dibalik semak melompati pagar kawasan industri. Saat diwawancarai mereka mengatakan “saya sembunyi disini menunggu bola yang keluar lapangan, lalu diambil kemudian dijual” tutur Asep salah satu warga yang diwawancarai pada tanggal 25 Juli 2024.

Berdasarkan fenomena tersebut manajemen golf sudah membuat strategi kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas dengan cara melibatkan masyarakat sebagai bagian dari industri. Misalnya memperbolehkan masyarakat untuk mencari bola bekas tapi pada waktu – waktu tertentu, lalu memberdayakan ibu rumah tangga sebagai buruh harian lepas, merekrut masyarakat yang memiliki kapasitas dalam lingkungan desa, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk berjualan di kantin karyawan walaupun beberapa orang saja. Nyatanya, strategi tersebut masih belum efektif untuk mengatasi permasalahan yang terus terjadi. Bahkan saat diwawancara kepala keamanan golf mengatakan “sampai kapanpun juga perselisihan ini akan terus terjadi”.

Apabila konsep kolaborasi yang sudah direncanakan dengan baik, tetapi dalam proses implementasinya tidak sukses terlaksana, maka antara industri dan masyarakat bisa menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan semua pihak yang terlibat. Riset ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pertukaran sosial yang telah diimplementasikan dapat mengoptimalkan kolaborasi antara industri pariwisata dengan masyarakat lokal di Kawasan PT Parahyangan Golf Bandung. Riset ini berjudul “Analisis Pertukaran Sosial (*Sosial Exchange*) Dalam Optimalisasi Proses Kolaborasi Industri Dengan Masyarakat Lokal Untuk Penerapan Ekonomi Inklusif di Kawasan Rekreasi Eksklusif”.

1. 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pertukaran sosial (*sosialexchange*) antara industri dan masyarakat lokal dapat memengaruhi efektivitas kolaborasi dalam mendukung penerapan ekonomi inklusif di kawasan rekreasi eksklusif?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi optimalisasi proses kolaborasi industri dengan masyarakat lokal melalui pendekatan pertukaran sosial di kawasan rekreasi eksklusif?
3. Sejauh mana penerapan prinsip ekonomi inklusif melalui kolaborasi berbasis pertukaran sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan pengelolaan kawasan rekreasi eksklusif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bentuk, mekanisme, dan dampak kolaborasi yang terjadi antara PT Parahyangan Golf Bandung dengan masyarakat lokal dalam konteks pembangunan, pengelolaan, atau kegiatan lainnya.
2. Untuk mengkaji bagaimana teori pertukaran sosial (*Social exchange Theory*) dapat menjelaskan dinamika interaksi, motivasi, dan pertukaran sumber daya antara PT Parahyangan Golf Bandung dan masyarakat lokal dalam proses kolaborasi.
3. Untuk menemukan faktor-faktor atau prinsip-prinsip dalam *Social exchange Theory* yang dapat mendorong terciptanya kolaborasi yang optimal dan saling menguntungkan antara PT Parahyangan Golf Bandung dan masyarakat lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan terkait yaitu pihak pemerintah daerah, masyarakat lokal dan PT Parahyangan Golf Bandung dalam pengelolaan industri pariwisata yang lebih baik.